



Pemenuhan Aksesibilitas Layanan Perpustakaan Bagi Penyandang Disabilitas

Indah Listyaningrum

Universitas Tanjungpura

Email : indah.listyaningrum@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Artikel ini menjelaskan upaya pemenuhan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas. Untuk itu artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai layanan publik yang ramah disabilitas melalui pemenuhan aksesibilitas layanan yang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada pihak Perpustakaan Daerah Wilayah Kalimantan Barat (Perpusda Kalbar). Studi ini menunjukkan bahwa, Perpusda Kalbar sebagai sebuah lembaga pelayanan publik belum ramah disabilitas atau belum dapat memenuhi aksesibilitas layanan perpustakaan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana amanat UU No. 43 Th. 2007 bab II pasal 5 ayat 3 tentang Perpustakaan. Akan tetapi, dalam upaya pemenuhan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi Penyandang Disabilitas, Perpusda Kalbar telah melakukan beberapa upaya baik yang telah terealisasi maupun yang masih dalam proses perencanaan.

Kata Kunci: *Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Difabel, Kesejahteraan Sosial*

Abstract

This article describes efforts to fulfill the accessibility of library services for persons with disabilities. For this reason, it is hoped that this article can enrich the study of disability-friendly public services by fulfilling adequate service accessibility. The research method used in this study is a qualitative research method. Primary data was collected through in-depth interviews with the West Kalimantan Regional Library (Perpusda Kalbar). This study shows that the West Kalimantan Regional Library as a public service institution is not yet disability-friendly or unable to fulfill the accessibility of library services for Persons with Disabilities as mandated by Law no. 43 Years 2007 chapter II article 5 paragraph 3 concerning Libraries. However, in an effort to fulfill the accessibility of library services for Persons with Disabilities, the West Kalimantan Regional Library has made several efforts, both those that have been realized and those that are still in the planning process.

Keywords: *Accessibility, Public Services, Disabilities, Social Welfare*

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tercantum dalam Permensos RI Nomor 08 Tahun 2012 bahwa penyandang disabilitas (baik anak maupun dewasa) masuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan individu / kelompok yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak disebut sebagai Penyandang Disabilitas. Berdasarkan data pada tahun 2011 penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 36.150.000 orang atau sekitar 15% dari 241 juta jiwa total penduduk Indonesia (Syafi'ie, 2014)

Dalam upaya menjembatani kebutuhan akibat keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang khusus mengatur tentang pemenuhan hak *Difabel* yang tercantum dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bagi seluruh warga negara, termasuk yang berkebutuhan khusus (*difabel*). Akan tetapi, berbagai fakta menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif yang sering dialami penyandang disabilitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya. Satu diantaranya adalah aksesibilitas layanan publik yang kurang memadai bagi penyandang disabilitas. Terkait hal ini dibutuhkan konsistensi dari berbagai pihak yang berkompeten tidak terkecuali pada layanan perpustakaan.

Sebagai implementasi dari kebijakan yang telah ada dan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Th. 2004 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Keberadaan Perda ini membuat Instansi-instansi pemerintahan di provinsi Kalimantan Barat mulai berbenah diri dalam upaya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas baik Fisik maupun Non-Fisik, khususnya yang terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik. Berdasarkan data yang diperoleh melalui website PPD (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia), diketahui bahwa hingga tahun 2014 terdapat lebih dari 20 ribu penyandang disabilitas di Kalimantan Barat (PPDI, 2014).

Salah satu lembaga pelayanan publik di Kalimantan Barat adalah Perpustakaan Daerah yang berperan dalam memberikan fasilitas layanan perpustakaan bagi masyarakat sebagai kegiatan utamanya dengan pemberian informasi dan penyediaan sumber bacaan sebagai jendela ilmu, baik cetak maupun non cetak, tidak terkecuali bagi Penyandang Disabilitas. Menurut UU No. 43 Th. 2007 bab II pasal 5 ayat 3 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa, masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Penelitian mengenai aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya inklusi dan keadilan dalam masyarakat. Studi empiris yang dilakukan oleh Anggara dan Pramono (2020) yang meneliti aksesibilitas perpustakaan bagi penyandang tunanetra di Kota Malang menunjukkan bahwa, ada beberapa kendala aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang tunanetra, seperti tidak adanya fasilitas perpustakaan yang ramah tunanetra, kurangnya buku dengan format Braille atau audio, serta kurangnya pelayanan yang memadai. Hal ini didukung oleh studi Sari dan Rahmawati (2020) yang meneliti aksesibilitas perpustakaan bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan di Kota Surabaya masih belum sepenuhnya ramah penyandang disabilitas, terutama bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya fasilitas aksesibilitas seperti lift atau ramp, serta kurangnya koleksi buku dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Kemudian, penelitian lainnya mengenai aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas juga dilakukan oleh Hardiyanti dan Rohman (2020) yang meneliti persepsi dan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan perpustakaan di Universitas Sebelas Maret menunjukkan bahwa, beberapa kendala yang dihadapi oleh mahasiswa penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan perpustakaan, seperti kurangnya buku dalam format yang dapat diakses, kurangnya pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, serta kurangnya dukungan dari staf perpustakaan. Penelitian senada juga dilakukan oleh Kurniawan (2021) yang meneliti aksesibilitas perpustakaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Hasil studinya menunjukkan bahwa perpustakaan di Kabupaten Sleman masih belum sepenuhnya ramah penyandang disabilitas, terutama bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya fasilitas aksesibilitas seperti lift atau ramp, serta kurangnya koleksi buku dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Melalui kajian studi terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak perpustakaan yang belum sepenuhnya ramah penyandang disabilitas, akan tetapi berdasarkan studi yang ada diketahui bahwa

penelitian mengenai aksesibilitas perpustakaan bagi kaum *difabel* masih jarang dilakukan di Kalimantan barat. Berkaitan tersebut, maka peneliti ingin mempelajari lebih lanjut mengenai pemenuhan aksesibilitas layanan publik dalam hal ini adalah layanan perpustakaan bagi Penyandang Disabilitas khususnya di Kalimantan Barat, yang diharapkan dapat meningkatkan inklusi sosial.

METODE

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis aksesibilitas layanan perpustakaan wilayah Kalimantan Barat bagi Penyandang Disabilitas, peneliti menggunakan metode kualitatif secara utuh, komprehensif, dan holistik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, pengalaman, kepercayaan dan motivasi dari informan terkait subject matters penelitian. Data di analisis melalui proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan kesimpulan data. Dengan demikian, studi ini hendak menjawab, (1) bagaimana pemenuhan layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas pada perpustakaan Kalbar? (2) bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh perpustakaan Kalbar dalam pemenuhan aksesibilitas layanan perpustakaan bagi Penyandang Disabilitas? Output penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi bagi pengguna dalam pemenuhan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas khususnya untuk meningkatkan inklusi sosial.

HASIL

Penyediaan **aksesibilitas fisik** khususnya pada bangunan umum untuk pelayanan publik termasuk Layanan Perpustakaan yang layak *Difabel* seharusnya dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dengan menyediakan: (1) akses ke, dari dan di dalam bangunan; (b) pintu, ramp, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat; (3) tempat parkir dan tempat naik turun penumpang; (4) toilet; (5) peringatan darurat; dan (6) tanda khusus.

Pada Perpustakaan Kalbar, penyediaan aksesibilitas fisik yang layak difabel sebagaimana standar yang ditetapkan di atas belum dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Mulai dari luar gedung ke dalam, masih menggunakan akses tangga dan belum terdapat fasilitas jalan yang 'landai' yang mungkin dapat digunakan untuk penyandang disabilitas penderita *Tunanetra*, atau mungkin yang menggunakan kursi roda, dan struktur bangunan yang bertingkat tiga, masih menggunakan tangga juga sebagai sarana akses tanpa lift, begitu juga dengan toilet yang masih belum memadai untuk pengunjung *difabel*. Berdasarkan informasi selanjutnya yang diperoleh, diketahui bahwa tidak ditemukan pengunjung yang mengunjungi perpustakaan adalah mereka yang berkebutuhan khusus. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan bagian pelayanan informasi Perpustakaan Kalbar. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, diketahui bahwa Perpustakaan Kalbar telah jauh hari memikirkan bagaimana aksesibilitas layanan perpustakaan ini dapat memenuhi kebutuhan kaum difabel, hal ini ditandai dengan tersedianya beberapa eksemplar Buku dengan tulisan huruf *Braille*.

Mengingat aksesibilitas layanan fisik yang masih minim dan belum layak *difabel*, wajar kiranya jika hingga saat ini jarang terdapat pengunjung perpustakaan Kalbar dari kaum difabel yang berkebutuhan khusus. Padahal, mereka adalah bagian masyarakat Kalbar. Kebutuhan mereka adalah kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat lainnya. Sama-sama punya hak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dengan potensi yang mereka miliki, memperoleh perlindungan serta manfaat terhadap akses pelayanan publik di wilayah Kalimantan Barat, termasuk pelayanan perpustakaan yang menyediakan literatur-literatur pembuka cakrawala dunia.

Selain aksesibilitas fisik, **aksesibilitas non fisik** juga memegang peranan penting dalam penyediaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas sesuai dengan minat dan kemampuannya. Penyediaan aksesibilitas berbentuk non fisik meliputi : Pelayanan informasi, untuk memberikan informasi kepada

penyandang disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada : (1) bangunan pemerintah, swasta; (2) bangunan umum atau fasilitas umum; (3) jalan umum; (4) pertamanan; (5) pemakaman umum; dan (6) angkutan umum. Pelayanan khusus, ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan di : (1) bangunan pemerintah dan swasta; (2) bangunan umum atau fasilitas umum; (3) jalan umum; (4) pertamanan; (5) pemakaman umum dan ; (6) angkutan umum.

Aksesibilitas non fisik dikaitkan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan dan dipahami oleh penyandang disabilitas. Hal ini berkaitan dengan bagaimana merespon kebutuhan penyandang disabilitas, ketika menyediakan atau menyebarluaskan informasi apakah informasi yang dibuat dapat dipahami oleh penyandang disabilitas runtu, netra (*low vision*) atau penyandang kesulitan dalam belajar (*learning disability*). Terkait hal ini, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perpustakaan Kalbar belum dapat memenuhi kebutuhan informasi para penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan Perpustakaan Kalbar. Tidak terdapat Corner atau 'Pojok Khusus' yang tersedia untuk para difabel, sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan jika struktur bangunan belum dapat diubah karena tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Kemudian, untuk dapat membuat informasi yang lebih aksesibel, penting untuk memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu, misalnya menggunakan ukuran *font* yang besar agar dapat diakses oleh individu *low vision*. Serta memberikan layanan "*communication support*", yang bertujuan agar penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada, misalnya membacakan teks tertentu untuk tunanetra, menggunakan catatan atau tulisan ketika berkomunikasi dengan penyandang runtu-wicara, dan sebagainya. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sejauh ini belum terdapat tenaga kepastakaan yang memahami bahasa isyarat guna memberikan layanan *communication supports* kepada pengunjung yang difabel penyandang tuna runtu. Keberadaan *Corner* atau 'Pojok Khusus' yang dilengkapi dengan beberapa tenaga perpustakaan yang paham bahasa isyarat, setidaknya menjadi solusi untuk aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas selain fasilitas pendukung lainnya, yang akan memudahkan komunikasi dan penyaluran informasi oleh pihak perpustakaan kepada pengunjung *difabel*.

PEMBAHASAN

Guna menjembatani kebutuhan akibat keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang khusus mengatur tentang pemenuhan hak *difabel* yang tercantum dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bagi seluruh warga negara, termasuk yang berkebutuhan khusus (*difabel*). Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi dari kebijakan yang telah ada (UU No. 4 Th. 1997 tentang Penyandang Cacat dan PP No. 43 Th. 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat) Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Th. 2004 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Keberadaan Perda ini membuat Instansi-instansi pemerintahan di provinsi Kalimantan Barat mulai berbenah diri dalam upaya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas baik Fisik maupun Non-Fisik, khususnya yang terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik. Berdasarkan data yang diperoleh melalui website PPD (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia), diketahui bahwa hingga tahun 2014 terdapat lebih dari 20 ribu penyandang disabilitas di Kalimantan Barat (PPDI, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa Perpustakaan Daerah wilayah Kalimantan Barat sebagai sebuah lembaga pelayanan publik belum dapat berperan dalam memberikan fasilitas layanan perpustakaan bagi Penyandang Disabilitas, sebagaimana amanat UU No. 43 Th. 2007 bab II pasal 5 ayat 3 tentang Perpustakaan, bahwa, masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental,

intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Akan tetapi, Perpustakaan Kalbar telah melakukan beberapa upaya dan memiliki rencana-rencana kedepannya guna memenuhi aksesibilitas layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas, yakni; tersedianya beberapa eksemplar buku bacaan dengan huruf Braille, melakukan Studi Banding ke beberapa perpustakaan yang ramah difabel (Jogja, Surabaya, Jakarta), mengajukan Proposal ke Pemerintah Daerah Prov. Kalbar dalam upaya perbaikan infrastruktur yang ramah difabel, merencanakan pembuatan *corner* atau Pojok Khusus bagi difabel, dan merencanakan untuk mengirim beberapa tenaga perpustakaan untuk mengikuti kursus/ketampilan bahasa isyarat, sebagai *communication support* bagi tuna wicara.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang ada terkait Upaya Pemenuhan Aksesibilitas Layanan Perpustakaan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Perpustakaan Daerah Wilayah Kalimantan Barat, maka dapat disimpulkan bahwa, Perpustakaan Daerah wilayah Kalimantan Barat sebagai sebuah lembaga pelayanan publik belum dapat berperan dalam memenuhi aksesibilitas layanan perpustakaan bagi Penyandang Disabilitas, sebagaimana amanat UU No. 43 Th. 2007 bab II pasal 5 ayat 3 tentang Perpustakaan, bahwa, masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Dalam upaya pemenuhan Aksesibilitas Layanan Perpustakaan Bagi Penyandang Disabilitas, Perpustakaan Daerah Wilayah Kalimantan Barat telah melakukan berbagai upaya, baik yang telah dilakukan maupun yang masih dalam proses perencanaan, yakni mulai dari; (1) Telah menyediakan beberapa eksemplar buku bacaan dengan huruf *Braille*; (2) Melakukan Studi Banding ke beberapa perpustakaan (Jogja, Surabaya, Jakarta) yang ramah difabel; (3) Mengajukan Proposal ke Pemerintah Daerah Prov. Kalbar dalam upaya perbaikan infrastruktur yang ramah difabel; (4) Merencanakan pembuatan *corner* atau Pojok Khusus bagi difabel; (5) Merencanakan untuk mengirim beberapa tenaga perpustakaan untuk mengikuti kursus/ketampilan bahasa isyarat, sebagai *communication support* bagi tuna wicara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, R., & Pramono, R. (2020). Aksesibilitas perpustakaan bagi penyandang tunanetra di Kota Malang. *Jurnal Pustakawan Indonesia*.
- Friedlander, Walter A, dan Robert Z. Apte. 1980. *Introduction to Social Welfare*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Hardiyanti, I., & Rohman, A. (2020). Persepsi dan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan perpustakaan Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*.
- Kurniawan, A. (2021). Aksesibilitas perpustakaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. *Jurnal Perpustakaan Pertanian*.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: the Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications Ltd.
- Patton, Quinn, Michael. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications Inc., California.
- Rukminto, Isbandi Adi. 1994. *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar-dasar Pemikiran*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sari, E. P., & Rahmawati, Y. (2020). Aksesibilitas perpustakaan bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya. *Jurnal Pustakawan Indonesia*.
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial : Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Syafi'ie, M. 2014. *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*. *Jurnal INKLUSI*, Vol.1, No. 2 Juli-Desember.

Konvensi dan Undang-undang :

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Permensos RI Nomor 08 Tahun 2012, tentang PPKS dan PSKS.

Permen PU RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Perda Kalbar No.1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bagi seluruh warga negara, termasuk yang berkebutuhan khusus (*difabel*).

UU Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan.

UU Nomor 43 tahun 2007, tentang Perpustakaan.

UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Sumber Lain

PPDI. 2014. *Perda Disabilitas Disahkan*. Diakses pada tanggal Maret 2017, melalui <https://ppdi.or.id/>

Rustanto, Bambang. 2014. Konsep Disabilitas. Diakses pada 16 April 2017 melalui <http://bambang-rustanto.blogspot.com>